



Waspada/Humas FPK

WAKIL Gubernur Provinsi Kalteng Ir. Achmad Diran dan Pembina FPK/Wagubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M. Si serta anggota FPK (Forum Kerukunan Kebangsaan) Sumut foto bersama dengan tokoh masyarakat lintas etnis Kalteng sesuai dialog kebangsaan sekaligus silaturahmi.

Peristiwa Sampit Jangan Jadi Dokumentasi Anak Cucu

Laporan Erwan Efendi

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beserta jajaran, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta semua elemen masyarakat di daerah tersebut bersepakat tidak akan membicarakan lagi konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2001. Karena membicarakan kembali konflik itu, sama artinya mengangkat atau mengingatkan kembali masyarakat pada peristiwa yang sangat memilukan itu di Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila itu.

"Mohon, konflik itu jangan lagi dibicarakan," tutur Wakil Gubernur Kalteng Ir. Achmad Diran dalam pertemuan silaturahmi dan dialog kebangsaan dengan rombongan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Sumatera Utara dipimpin Pembina FPK/Wagubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M. Si di Aula Kantor Gubernur Kalteng, Palangkaraya, Rabu (13/11). Rombongan FPK Sumut selain Pembina H. T. Erry Nuradi, M. Si juga Ketua FPK Sumut H. Bahari Damanik, Sekretaris Dr. H. Arifinsyah, M. Ag. Bendahara Suwito serta anggota H. Muhammad D. AM. Situmorang, Nabari Ginting, H. Sarwi Edli, Juliswan Damanik, Zakaria Y. Lafau, R. Gopala Krishana, Syafarudin, H. Zulkarnain Guci, Asdani, H. Erwan Efendi, H. Bustami Usman serta sekretariat Husni Akmal, Ahmad Syamsuri Polem dan Anies Sembiring. Silaturahmi juga dihadiri para tokoh, agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan paguyuban serta pengurus FPK Kalteng.

Pemprov Kalteng dan jajarannya saat ini terus mengawal perdamaian yang sudah disepakati bersama antara dua etnis yang berkonflik (Dayak dan Madura), sehingga suasana Kalteng saat ini cukup kondusif dan harmonis. Salah satu upaya mengawal butir dari perdamaian itu adalah bahwa semua pihak harus menahan diri untuk tidak mengungkit atau mencitakan kembali peristiwa kelam yang melanda Bumi Tambun Bungai dengan luas sekitar 153.364 kilometer persegi atau 1,5 kali pulau Jawa dengan 13 kabupaten dan satu kota. Secara psikologi, jika peristiwa itu diangkat kembali dikhawatirkan akan membangkitkan rasa dendam dan bermuara pada terulangnya kembali Sampit ke dua.

Setelah perdamaian disepakati, awalnya suasana yang sebelumnya terlihat

masih tegang seperti api dalam sekam, secara berangsur mulai normal dan kondusif. Warga yang tadinya dengan terpaksa harus mengungsi meninggalkan Kalteng khususnya Sampit secara berangsur pula kembali masuk, dan saat ini mereka hidup tenang dan nyaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pemprov Kalteng berkeinginan suasana kondusif dan harmonis yang sudah terbangun saat ini jangan lagi diganggu atau terganggu antara lain seperti membicarakan lagi masa lalu. Peristiwa Sampit pada tahun 2001 merupakan pukulan pahit bagi Pemprov Kalteng dan jajarannya, karena cukup banyak menelan korban baik material begitu juga jiwa.

Alasan itu pula, Wakil Gubernur Kalteng Ir. Achmad Diran menegaskan, konflik itu tidak boleh lagi terjadi, dan oleh karena itu semua pihak harus memahami posisi masing-masing dengan kata lain "*Dimana bumi di pijak di situ langit dijunjung*". Toleransi dan rasa persaudaraan yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika harus terus dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemprov Kalteng menyadari sepenuhnya bahwa memperbaiki kondisi pasca konflik sangat sulit daripada memperkuat kondusifitas yang sudah dibangun. Menyadari kesulitan itu, Pemprov Kalteng beserta jajarannya dan Muspida berupaya menutup sekecil mungkin masuknya isu-isu yang bisa membangkit kembali emosional masyarakat.

Sesuai visi gubernur dan wakil gubernur, visi pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2015 "Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Sedangkan misi antara lain "Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonitas kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah". Oleh karena itu, Pemprov Kalteng tidak hanya menjaga dan membangun kondusifitas dua etnis yang berkonflik, tapi lebih daripada itu juga membangun tri kerukunan yakni: kerukunan antar umat beragama, kerukunan interumat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. **(Bersambung)**